

Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan *Incumbent* pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri

ENDIK HIDAYAT*

Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga
Kampus B UNAIR – Jl. Dharmawangsa Dalam, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286
Indonesia

BUDI PRASETYO**

Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga
Kampus B UNAIR - Jl. Dharmawangsa Dalam, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286
Indonesia

SETYA YUWANA***

Program Studi Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya
Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Indonesia
E-mail: endikhidayat-16@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik politik oligarki dalam pemilihan kepala desa yang memiliki perbedaan pola dengan pemilihan umum di tingkat lokal dan nasional. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki berbasis sumber daya material gagal memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Meskipun demikian, penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa Tanjung tersebut. Sebaliknya, semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial yang digunakan calon kepala desa maka semakin besar pula kemungkinan terpilihnya. Sumber kekuasaan nonmaterial tersebut identik dengan kekuasaan Jawa berasal energi mistis *kesakten* yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri kontestan dalam menghadapi pemilihan. Dengan demikian, peranan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan nonmaterial dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak sama atau bertolak belakang dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional.

Kata kunci: oligarki, elit, sumber kekuasaan, politik lokal

* Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Sosial UNAIR.

** Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik UNAIR.

*** Penulis adalah Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang.

ABSTRACT

This study aims to prove oligarchy in the electoral process to elect village leaders (headmen) in Indonesia is different compared to other elections at the local and national level. By applying qualitative research methods and looking at the case of Tanjung Village, Pagu District, Kediri Regency, this study reveals that political oligarchy based on material resources failed to secure candidates' success at the election in the village. The study shows that all candidates have tried to maximize the benefit of both material resources and spiritual power according to Javanese values. However, the use of money and formal institutions as the basic character of oligarchy as indicated by some scholars is not always effective in gaining votes in the headman election. On the contrary, the application of non-material power used by the elected headman election candidates proves as more effective to attract more votes. The source of non-material power is parallel with Javanese power derived from the mystical energy of '*kesakten*', and it works effectively to increase contestants' confidence in embracing the headman election. Therefore, this article argues that the application of material power and non-material sources of power at headman election is different with political contestation at district, city, provincial and national levels.

Keywords: oligarchy, elite, power sources, local politics

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>

PENDAHULUAN

Kontestasi pemilihan kepala desa merupakan kelanjutan dari demokratisasi Indonesia di tingkat pedesaan. Kebijakan politik terbaru di tingkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) yang dilakukan secara serentak. Pemilihan kepala desa sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sumber-sumber kekuasaan dalam dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata merupakan perebutan kekuasaan sebagai unjuk kekuatan ekonomi yang menjadi basis kekuasaan yang bersifat oligarki, akan tetapi juga menjadi ajang apakah terdapat sumber-sumber kekuasaan nonmaterial yang masih digunakan oleh para kontestan.

Dengan penekanan sumber daya kekuasaan pada kapasitas aktor-aktor politik, Winters (2013) mengandaikan bahwa pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki suatu kuantum kekuasaan mulai dari sangat kecil (hampir nol) hingga sangat besar. Selanjutnya Winters menawarkan lima sumber daya kekuasaan individual meliputi hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi, (*mobilizational*

power), dan kekuasaan material (*material power*). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara eksklusif atau terkonsentrasi, adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai politik “elite”. Sumber daya yang terakhir, kekuasaan material, dapat dikategorikan sebagai basis kekuasaan oligarki (Winters 2011, 15-20).

Kelima sumber daya tersebut ada di Indonesia dan masing-masing memainkan peran politiknya dalam pemilihan umum. Artinya, besarnya kekuasaan berbanding lurus (seperti uang) dengan kepemilikan sumber-sumber tersebut. Sebagai contoh, besarnya kekuasaan material yang dimiliki oleh seorang kandidat akan berbanding lurus dengan kekuasaan yang akan didapat atau keberhasilan dalam aktivitas politik. Sebagai konsep yang berasal dari luar, penggunaan konsep-konsep tersebut belum dapat menjelaskan secara tuntas gejala politik kekuasaan dalam masyarakat Indonesia khususnya mereka yang masih memegang nilai-nilai tradisional, seperti yang dapat ditemui di pedesaan Jawa. Di dalam kebudayaan Jawa terdapat istilah yang menurut Anderson (1972) identik dengan energi mistis, yakni ‘*kesakten*’. Untuk menjelaskan konsep kekuasaan Jawa, Anderson mengontraskannya dengan konsep kekuasaan Barat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu abstrak tidaknya kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, jumlah kekuasaan dan moralitas kekuasaan (Surbakti 2010, 102). Dalam konsep kekuasaan Jawa biasanya seorang raja akan memiliki kekuasaan yang besar antara lain apabila dia memperoleh tanda kekuasaan berupa wahyu dari penguasa alam semesta. Untuk mempertahankan kekuasaan agar terus memusat, seorang raja atau penguasa biasanya melakukan pengekangan diri, antara lain menjauhkan diri dari berbagai hal keduniawian, seperti bertapa, berpuasa, atau melakukan tapabrata (Suseno 2003, 104). Tentu saja, hal-hal tersebut sulit untuk dapat diukur secara kasat mata, seperti halnya kepemilikan harta (uang) atau jabatan formal.

Berdasarkan teori sumber kekuasaan tersebut, artikel ini mengkaji dinamika politik yang paling dekat dengan masyarakat pedesaan, yaitu pemilihan kepala desa. Penelitian ini berusaha melacak sumber-sumber kekuasaan yang digunakan oleh kandidat-kandidat kepala desa karena terdapat dugaan bahwa masyarakat pedesaan masih menggunakan ni-

lai-nilai tradisional dalam menentukan pilihannya. Sementara itu, pada saat bersamaan, aktivitas politik yang serupa (pemilihan umum) untuk memilih kabupaten, kota, provinsi, hingga presiden disinyalir oleh beberapa ilmuwan telah didominasi oleh penggunaan materi untuk menarik pemilih. Seperti yang diungkapkan dalam studi Aspinall dan Sukmajati (2015, 4-5), terdapat penggunaan materi dalam bentuk patronase yang dapat berupa pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya. Pemberian tersebut ditujukan untuk individu dan kepada kelompok/komunitas yang berasal dari dana pribadi maupun dari dana publik. Penggunaan dana publik tersebut dapat dikategorikan sebagai proyek yang bersifat *pork barrel* yang didanai pemerintah.

Untuk mengetahui apakah pola-pola penggunaan materi sebagai basis untuk meraih kekuasaan di berbagai tingkatan tersebut juga berlaku pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang bersifat abstrak, tulisan ini menganalisis pilkades di Desa Tanjung, Kabupaten Kediri. Salah satu pertimbangan memilih Desa Tanjung adalah termasuk desa dengan karakter budaya Jawa cukup kuat. Sebagai contohnya, setiap awal tahun baru Islam dan Jawa (1 *Suro*) kuatnya tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat Jawa masih terlihat melalui berbagai kegiatan diantaranya *slametan*, bersih desa, *tayuban* dan wayang kulit. Terlihat bahwa pengaruh budaya pra-Hindu-Buddha dan budaya Hindu-Buddha yang berkembang sebelum datangnya Islam, tetap masih mempengaruhi masyarakat Jawa khususnya mereka yang tinggal Dusun Balekambang, Desa Tanjung. Beberapa tradisi turun-temurun masyarakat Dusun Balekambang yang masih terlihat, seperti adanya *sesajen* dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, penyelenggaraan *slamaten* untuk menghormati seseorang yang telah meninggal, kepercayaan pada roh-roh halus, dan pada saat dilakukan bersih desa semua warga desa dilarang beraktivitas karena takut kesurupan (kemasukan roh halus). Apalagi, lokasi Desa Tanjung sangat dekat dengan situs sejarah Kerajaan Kediri, yakni petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Sendang Tirta Kamandanu. Selain sebagai Raja Kediri pada abad XII, Raja Joyoboyo juga terkenal dengan kitab “Jongko Joyoboyo” yang berisi ramalan-ramalan kejadian di masa yang akan datang. Ten-

tu menjadi pertanyaan apakah para kontestan pilkades Desa Tanjung berusaha memengaruhi pemilih di desa tersebut dengan menggunakan legitimasi kultural Jawa atau simbol-simbol kekuasaan Jawa. Walaupun studi dengan menggunakan sudut pandang budaya menunjukkan penurunan pasca-Orde Baru, indikasi bahwa sebagian aspek dari praktik politik rezim tersebut disinyalir masih berlangsung, seperti yang ditunjukkan oleh kajian ekonomi politik dan oligarki.

Kajian-kajian pasca-Soeharto dalam beberapa studi ekonomi politik di Indonesia menunjukkan hadirnya reformasi 1998 tidak meniadakan kekuatan politik yang telah terbentuk saat masa Orde Baru (Robison dan Hadiz 2004; lihat juga Winters 2011). Jaringan kekuasaan oligarki sebagai kekuatan sosial yang dibangun sejak berdirinya Orde Baru tidak dengan sendirinya kehilangan kekuasaan setelah Soeharto lengser. Pada kenyataannya, jejaring kekuasaan oligarki tersebut tetap menjadi kekuatan sosial yang dominan pasca-Orde Baru (Robison dan Hadiz 2004; Ananta 2016). Dalam kondisi demikian, persaingan untuk memperoleh sumber daya material selalu terjadi di antara aktor, baik dalam skala internasional, nasional, maupun lokal (Hadiz 2010; Soeseno 2015; lihat juga Ananta 2016).

Dari paparan tersebut terlihat bahwa dinamika politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya penetrasi material. Pada tingkatan pemilih, misalnya, para peserta pemilihan umum, baik untuk kepala daerah maupun legislatif, masih berupaya menggunakan materi sebagai daya tarik. Namun, terlihat pula bahwa kajian-kajian tersebut masih berada pada aktivitas politik di atas pedesaan. Kajian-kajian mengenai politik pedesaan sendiri merupakan studi yang cukup menarik mengingat karakternya yang berbeda satu sama lain. Beberapa kajian desa pasca-UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disebutkan misalnya, Bahar (2017) yang memfokuskan kepada interaksi orang kuat lokal kiai dengan *bejangan* dalam Pilkades di Kabupaten Bandowoso. Selain itu, terdapat pula tulisan Yuniningsih (2016), yang memfokuskan dinamika pilkades di desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di Jawa Barat. Aspinall dan Rohman (2017) sudah berupaya untuk melihat adanya kesamaan dengan praktik kekuasaan di tingkatan di atas pedesaan

dengan mengatakan bahwa terdapat pertarungan elite desa dan jaringan patronase kekuasaan dalam pilkades di Jawa Tengah. Temuan yang sama juga terlihat dari penelitian Sukron (2017) memfokuskan pergeseran elite lokal dan kemunculan elite ekonomi yang mendominasi di pilkades Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pemaparan studi sebelumnya tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang membidik praktik oligarki di pemilihan kepala desa, apalagi membandingkannya dengan analisis kultural. Tulisan ini juga ingin melihat perbedaan praktik oligarki di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat pedesaan. Jika studi Jeffrey Winters (2011), Richard Robison maupun Vedi Hadiz (2004) berkesimpulan bahwa politik oligarki dan sumber daya material masih dominan dalam politik nasional dan politik lokal (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia, tulisan ini berargumen bahwa sumber kekuasaan material basis dari oligarki memang masih terdapat di dalam pilkades, namun penggunaan sumber-sumber kekuasaan yang nonmaterial yang berbasis nilai-nilai Jawa juga bekerja, bahkan berhasil dimaksimalkan untuk memenangkan pilkades oleh salah seorang kandidat.

Artikel ini menganalisis praktik oligarki dalam pilkades di Desa Tanjung. Penelitian ini ingin melihat konfigurasi sumber-sumber kekuasaan oligarki dalam memenangkan pemilihan kepala desa. Tentunya akan menarik untuk melihat apakah praktik politik di tingkat desa bertumpu pada keunggulan sumber daya material semata seperti ditunjukkan oleh analisis oligarki ataukah sumber kekuasaan nonmaterial juga bekerja pada waktu yang bersamaan. Untuk tujuan itu, penerapan konsepsi kekuasaan Jawa cukup membantu untuk memahami dinamika pilkades di Desa Tanjung tersebut.

OLIGARKI DAN KULTUR DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Memahami dinamika politik pedesaan tentu tidak sesederhana menentukan adanya satu faktor yang bekerja di dalamnya. Alasan yang paling utama adalah kontestasi pilkades juga menjadi isu ekonomi politik yang menonjol di pedesaan Jawa, dengan adanya sumber ekonomi yang men-

jadi daya tarik bagi pemenangnya berupa tanah bengkok, dana desa, dan gengsi sosial jabatan pamong desa. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari cara pandang materialistik. Selain menjadi daya tarik bagi warga masyarakat untuk menjadi kandidat, keberadaan konsekuensi material dari keberhasilan memenangkan pilkades juga mendorong keterlibatan keluarga oligarki kaya, tokoh agama, penjudi, dan tim sukses dari kelompok jawara desa (Bahar 2017). Oleh karena itu, selain penggunaan simbol kekuasaan Jawa yang merupakan perekat politik secara kultural masyarakat pedesaan, terdapat pendekatan ekonomi politik berupa pemberian politik uang, barang, dan jasa. Hal itu mendorong munculnya kritik ilmuwan yang mencoba menjelaskan dinamika politik desa hanya dengan sisi kultural semata. Robison (1981) misalnya mengkritik pendekatan kultural berdasarkan argumen bahwa hubungan patron-klien di pedesaan telah runtuh menjadi oligarki. Pemunculan kelas kulak dapat diduga akan membawa perubahan-perubahan fundamental dalam hubungan-hubungan politik di dalam kehidupan pedesaan dan antara pedesaan dengan negara. Karena itu, jaringan patron-klien tidak akan memadai untuk mengamankan sarana-sarana politik dan ekonomi antara kelas-kelas di pedesaan dan bagi hubungan struktural antara kelas-kelas pedesaan dengan negara. Mengingat masih adanya tradisi dan kepercayaan berdasarkan cara pandang Jawa dalam beberapa kantong masyarakat pedesaan Jawa, perlu kiranya melihat dinamika politik di tingkat pedesaan dengan cara pandang kultural, terutama melalui konsepsi kekuasaan Jawa.

Perkembangan konsepsi kekuasaan Jawa di Indonesia banyak merujuk pada studi-studi yang dilakukan oleh Benedict Anderson (1972) dan Soemarsaid Moertono (1985). Secara garis besar, keduanya melihat bahwa dalam kebudayaan Jawa tradisional mempunyai teori politik yang dapat memberikan penjelasan sistematis dan logis tentang tingkah laku politik dalam bentuk yang berbeda dari perspektif ilmu politik Barat.

Menurut Anderson (1972), kekuasaan dalam konsep Barat bersifat abstrak, yakni suatu rumusan dari pola-pola interaksi sosial, sedangkan pada masyarakat Jawa memahami sebagai suatu yang konkret. Karena kekuasaan berasal dari hasil interaksi dari berbagai kelompok

dan kepentingan, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sumber kekuasaan bersifat heterogen, seperti kekayaan, status sosial, jabatan formal, organisasi, senjata, jumlah penduduk dan sebagainya. Sebaliknya, konsep Jawa memandang sumber kekuasaan sebagai hal yang homogen. Akumulasi sumber kekuasaan heterogen tidak terbatas, tetapi sebaliknya kebudayaan Jawa memahaminya sebagai sesuatu yang tetap karena begitu jugalah alam semesta. Yang terakhir Barat memahami kekuasaan tidak dengan sendirinya absah, sementara konsep Jawa tidak mempersoalkan keabsahan melalui pengakuan pihak lain. Karena paham kekuasaan Jawa yang bersifat adikodrati tidak memerlukan suatu interaksi seperti di atas. Konsep adikodrati memandang bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan barang siapa yang mendapatkan kekuasaan tersebut maka kekuasaannya tak perlu dipertanyakan keabsahannya. Pengertian bahwa kekuasaan bersifat konkret karena kekuasaan itu ada, bukanlah merupakan suatu hasil teoritis karena kekuasaan itu berasal dari Tuhan, dan ia bersifat adikodrati sehingga kekuasaan tidak mempunyai implikasi moral yang inheren.

Salah satu ilmuwan yang mendalami hal ini adalah Suyanto (2002) yang menilai bahwa gagasan *kesakten* Anderson di atas sebagai *spiritual power*. Pemikiran ini berasal dari studinya tentang pemahaman elite keraton Surakarta dan Yogyakarta terkait kekuasaan Jawa. Menurutnya, konsep kekuasaan Jawa mengenal peran *ngelmu kesempurnaan* yang kedudukannya penting bagi seorang penguasa karena dengan melalui cara demikian, seorang penguasa akan dapat memusatkan kekuasaan atau mengkonsentrasikan kekuasaannya baik yang bersifat empirik ataupun yang metaempirik. Melalui *ngelmu kesempurnaan* tersebut, seseorang mengharapkan akan kejatuhan wahyu, yaitu “sinar ilahi” yang amat penting untuk mendapatkan kekuasaan. Tanpa wahyu, seorang penguasa tak akan berarti apa-apa karena wahyu merupakan salah satu hal yang dapat melegitimasikan kekuasaannya. Konsekuensinya, kekuasaan seseorang penguasa akan memudar apabila ia tak lagi memiliki wahyu dalam dirinya. Kerajaannya pun akan merosot dan akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan keruntuhan.

Selain penggunaan konsepsi kekuasaan Jawa, kajian ini juga dilengkapi teori oligarki dan teori elite. Hal ini karena mendiskusikan kontestasi pilkades berbiaya tinggi tidak bisa dilepaskan dari penggunaan materi sebagai daya tarik bagi pemilih ataupun membiayai aktivitas politik kandidat. Perkembangan teori oligarki di Indonesia banyak merujuk pada studi yang dilakukan oleh Richard Robison, Vedi R. Hadiz, serta Jeffrey Winters (Robison dan Hadiz 2004; Hadiz 2010; Winters 2011). Baik Winters maupun Robison dan Hadiz berpendapat bahwa perubahan politik pasca-Orde Baru sebagai bagian demokratisasi tidak menyingkirkan kekuasaan oligarki yang telah dibangun sejak tumuhnya rezim Soeharto sehingga struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan oligarki, terutama bila demokrasi tersebut bersifat minimalis atau prosedural. Kedua analisis tersebut mengakui bahwa demokrasi mempunyai efek nyata bagi kekuasaan oligarki. Namun, mereka menolak kemungkinan bahwa pengaruh oligark dapat dikurangi oleh proses pemilu yang kompetitif (Ford dan Pepinsky 2014).

Konsep oligarki Winters serta, Robison, dan Hadiz berangkat dari konsep pertahanan kekayaan (*wealth defense*)¹. Dengan kata lain, oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan di antara para oligark. Kelompok oligarki di pedesaan Jawa (dalam hal ini Kabupaten Kediri) berangkat dari perpaduan antara bertahannya dinasti keluarga mantan kepala desa 'tuan tanah lama' dan kebangkitan kelompok elite ekonomi setelah reformasi. Mereka terdiri dari pedagang, pengusaha, dan birokrat. Keluarga oligarki menjadi *broker* politik dalam pemilu dan pilkades di sejumlah desa di Kabupaten Kediri, dengan harapan salah satunya membentuk jaringan politik dari tingkat desa sampai supradesa, dan memperoleh jabatan kepala desa dan hak atas tanah bengkok.

¹ Konsep *wealth defense* bersinggungan erat dengan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang datang seiring dengan dinamika politik utama para *oligarch* untuk mempertahankan kekayaan dari ancaman-ancaman itu. *Wealth defense* mengandung dua komponen; *pertama*, pertahanan harta (*property defense*), yaitu mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik. *kedua*, pertahanan pendapatan (*income defense*), yaitu menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman (lihat Winters 'oligarki' 2011).

Perebutan posisi kepala desa itu akan lebih menarik jika kepemilikan aset tanah bengkok desa di sebuah desa relatif luas.

Menurut Hadiz (2010), kunci keberhasilan reorganisasi oligarki tersebut terletak pada kelenturan jaringan otoritas politik dan kepentingan ekonomi yang menopang dan mencirikan oligarki serta menjalari institusi negara itu sendiri. Salah satu upaya bertahan hidup dari jaringan oligarki Orde Baru dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang disediakan desentralisasi. Menurut Hadiz, dengan dukungan kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi kekuatan dominan di tingkat lokal. Bahkan jaringan oligarki menggunakan politik uang untuk menguasai politik lokal di kota maupun desa, dengan motivasi untuk menguasai jabatan-jabatan publik yang berfungsi melanggengkan kekuasaan dan sistem pertahanan ganda untuk pertahanan kekayaan setiap oligark. Hal ini seperti ditegaskan Vedi R. Hadiz (2010, 122) berarti bahwa:

The post-authoritarian Indonesia, money politics – taking on a variety of forms – has become the main political game in town and village. In fact, contests for offices as bupati and mayor in today's Indonesia have become ever more feverish and costly. This is not surprising as the potential economic gains to be accrued from heading local governments remain tantalising, as are the opportunities to build more personalized instruments of power and networks of patronage through control of local administrative and political machineries. Thus, it may not be necessary for ambitious local politicians to aspire to partake in 'higher' level politics and political struggles. What is on offer locally can be enticing enough and sufficient to form the building blocks for local coalitions of predatory power and to sustain them materially.

Pada saat yang sama pemahaman tentang oligark seringkali dikaitkan dengan elite dan bahkan sering kali disamaartikan, padahal istilah oligark dan elite berbeda satu sama lain. Perbedaan kaum oligark dan elite terletak pada sumber daya kekuasaan (Winters 2011). Sebaliknya, jika melihat studi terkait sumber daya elite desa, terdapat indikasi bahwa

aktor-aktor politik di tingkat desa dapat menggunakan sumber daya nonmaterial untuk kepentingan pilkades, yang dalam artikel ini identik dengan sumber kekuasaan spiritual (kekuasaan Jawa). Salah seorang peneliti politik desa, Iberamsjah (2002, 75), memberi gambaran empiris tentang sumber daya kekuasaan di elite pedesaan. Menurutnya, sumber daya kekuasaan elite di pedesaan terbagi menjadi lima kategori. *Pertama*, elite agama yang mampu bertahan dengan sumber ilmu dan pengetahuan agama Islam. *Kedua*, elite birokrasi yang bertahan dengan sumber kekuasaan jabatan di pemerintahan. *Ketiga*, elite cendekiawan yang dapat berkuasa dengan sumber kekuasaan pendidikan ilmu pengetahuan. *Keempat*, terdapat pula elite ekonomi yang membangun kekuasaannya dengan sumber kekuasaan aset kekayaan. *Kelima*, elite jawara dengan sumber kekuasaan ilmu bela diri dan kebatinan. Dari kelima kategori tersebut, terlihat bahwa elite agama dan elite cendekiawan mampu memaksimalkan sumber nonmaterial untuk kekuasaan, termasuk elite jawara jika memaksimalkan sumber kebatinan.

Berkaitan dengan politik lokal, menurut Hadiz (2005, 2010) dan juga Ananta (2016) terdapat pola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal pasca-Orde Baru yang ditandai oleh beberapa ciri mendasar. *Pertama*, jejaring kekuasaan oligarki bersifat predatoris yang menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan individu. *Kedua*, koalisi yang cair dan tidak pernah stabil di tingkat lokal. Koalisi yang cair itu didasari oleh pragmatisme untuk mendapatkan sumber daya material di tingkat lokal. Dari perebutan sumber daya itulah kemudian koalisi atau konflik elite di tingkat lokal terbentuk. *Ketiga*, pola jaringan patronase di antara pejabat pemerintahan, pengusaha lokal, organisasi preman, dan aparat keamanan. *Keempat*, penggunaan politik uang dalam jumlah yang besar untuk memenangkan perebutan sumber daya publik. *Kelima*, penggunaan kekuatan koersif nonnegara (organisasi preman) untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik. *Keenam*, praktik di atas didukung dengan lemahnya kekuatan massa atau *civil society* di luar jaring oligarkis. Dengan ciri tersebut, jejaring kekuasaan oligarki dapat dielaborasi dalam

penelitian dinamika politik desa, apakah hasilnya sama atau bertolak belakang dengan fenomena politik lokal dan nasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil studi kasus pada pemilihan kepala desa di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kasus tersebut menarik diteliti karena pilkades Tanjung diduga mewakili desa dengan karakter budaya Jawa kuat. Studi ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan memberi gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Karakteristik deskriptif mendalam ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif oleh Denzin (2009) bahwa:

“Metode kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi, dan menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti”.

Setelah mengurus perizinan lokasi penelitian, proses pengumpulan data dimulai dengan bermukim di Desa Tanjung dan mendatangi para subjek penelitian. Hal ini dilaksanakan setelah pilkades di desa tersebut. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi pustaka, wawancara mendalam, dokumentasi laporan pilkades dan RPJMDes, dan *Focus Group Discussion* (FGD).² Dilihat dari keterba-

² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui: 1) Studi Kepustakaan; dengan cara mempelajari informasi dari literatur buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, web internet yang memuat informasi permasalahan yang diteliti. 2) Studi Dokumentasi; dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder meliputi; laporan Pilkades Tanjung, profil Desa Tanjung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan dokumen foto-foto hasil Pilkades Tanjung. 3) Wawancara mendalam (*in-depth interview*); dilakukan dengan cara wawancara berhadap-hadapan (*face-to-face interview*), melalui telepon (*telephone interview*), maupun dengan media surat elektronik (*e-mail*) terhadap informan yang dianggap dapat memberi informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dalam penelitian adalah tiga calon kepala desa Tanjung Agus, Rudi, dan Vito. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (BPMPD) Satirin, Wartawan Koran Lokal Eko, dan warga desa. 4) *Focus Group Discussion* (FGD) kelompok-

atasan studi, pemilihan fokus tema penelitian ini mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, penelitian ini membidik aktor-aktor oligarki politik pedesaan Jawa dan bukan pada preferensi politik masyarakat atau perilaku pemilih (*voter behavior*). Studi mengenai aktor-aktor oligarki desa yang menjadi fokus penelitian ini membahas konfigurasi sumber-sumber kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa, baik kandidat kepala desa atau pihak lain terlibat langsung pada pilkades. Studi sama sekali tidak berfokus dari sisi persepsi pemilih atau masyarakat desa. *Kedua*, penelitian ini adalah studi *post factum*, yakni penelitian yang analisisnya dilakukan setelah pilkades terjadi. Kondisi atau gambaran situasi jalannya Pilkades dilihat berdasarkan dari informan kunci, dokumen di desa, dan bukan berdasarkan pengamatan saat pilkades berlangsung. Karena itu studi *post factum* memiliki kelemahan, mengingat para informan yang diwawancarai berpotensi menutup-menutupi atau melebih-lebihkan kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan.

PILKADES DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Dinamika pemilihan kepala desa tidak terlepas dari isu ekonomi politik di Indonesia. Salah satu ilmuwan yang menelusuri sejarah pertarungan politik pedesaan dalam perspektif ini, W.F. Wertheim, menjelaskan hubungan antara perubahan-perubahan struktur sosial-ekonomi dan pertumbuhan ketegangan antara bentuk politik patronase dan politik kelas. Ia setuju bahwa pemisahan kelas di pedesaan belum secara tajam ditentukan dan organisasi politik terpaksa dibentuk melalui jaring-jaring klien-patron. Namun, ia juga mengajukan pendapat bahwa penyebaran kapitalisme di pedesaan pada tahun 1950an dan 1960an telah memantapkan bentuk identitas kelas yang lebih tegas dan mulai mendobrak perlindungan yang pada awalnya tersedia bagi kaum miskin dan papa berkat lembaga-lembaga tua komunal desa dan patronase (Wertheim 1969; lihat juga Robison 1981). Sejak 1965, pemusatan kepemilikan

kelompok diskusi informal selama peneliti tinggal di Desa Tanjung lokasi bisa di balai desa, rumah tempat tinggal peneliti, dan warung-warung Desa Tanjung.

tanah dan perkembangan menuju sistem kerja-upah telah mempertajam pembagian kelas dan dengannya mulai memperlemah struktur klien-patron. Perkembangan ini secara tidak langsung didorong sejak pemerintah Orde Baru memperkenalkan program Bimas (Bimbingan Massal Swasembada Pangan) dan sistem kredit Inpres (Instruksi Presiden). Lebih lanjut, tampak bahwa pejabat-pejabat pemerintah sendiri, dari kepala desa dan sersan tentara sampai bupati dan pejabat tinggi, tampil menjadi tokoh-tokoh terkemuka kelas kulak (Robison 1981).

Sejak itu, dengan meningkatnya polarisasi pemilikan tanah dalam bentuk konsentrasi tanah di tangan segelintir penduduk desa berakibat semakin banyaknya petani yang tidak memiliki atau hampir tidak memiliki tanah. Karena itu, banyak petani yang harus bergantung kepada pemilik tanah atau jika tidak mendapatkan pekerjaan dari pemilik tanah mereka mencari pekerjaan di luar desa. Dengan pola hubungan semacam itu, pemilik tanah luas menjadi kekuatan ekonomi utama di tingkat desa dan dengan cepat mengumpulkan tanah dengan cara merugikan petani miskin (Hinkson 1975; lihat juga (Priyono dan Tjiptoherijanto 1983, 65). Latar belakang permulaan konsentrasi tanah ini bisa dilihat dari segi meningkatnya kekuatan politis dari pemilik tanah luas, terutama lurah dan pamong desa. Hal ini menjadi mungkin karena monopolisasi hak-hak yang didapat melalui kedudukan mereka (Tjondronegoro 1978, 390; lihat juga Priyono dan Tjiptoherijanto 1983, 65).

Pada umumnya, dinamika politik Desa Tanjung di Kabupaten Kediri juga dipengaruhi polarisasi kepemilikan tanah tersebut. Posisi Kediri sendiri terletak sekitar 25 kilometer dari jalan raya utama yang menghubungkan Jombang dengan Surabaya dan Madiun di kawasan barat Jawa Timur. Meskipun demikian, di Keresidenan Kediri terdapat sejumlah pabrik gula (PG) dan sebuah pabrik rokok terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam. Dengan puluhan ribu pekerja, Kediri memiliki kehidupan ekonomi yang dinamis sekalipun agak terisolasi (Sulistyo 2000, 97). Kediri merupakan wilayah pertanian yang menjadikan salah satu sentra penghasil tebu sebagai bahan baku gula. Pola relasi tata niaga industri tebu cenderung mengikuti pertanian kapitalis yang dibangun di kalangan petani, tuan tanah, dan pabrik tebu. Mereka, para buruh

tani dan petani kecil, membangun kontak dengan tuan tanah secara langsung melalui sistem produksi tengkulak yang dilakukan oleh tuan tanah. Penggunaan kerja upah, penyediaan kredit pedesaan, bibit padi unggul, obat antihama, dan pupuk kimia telah menyediakan peluang bagi pemilik tanah menjadi petani kapitalis daripada menjadi tuan-tuan penarik sewa. Masyarakat pedesaan Jawa di Kabupaten Kediri tampak jelas sekali sedang bergerak menuju ke pemusatan kepemilikan tanah yang diiringi oleh polarisasi antara yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah (Sulistyo 2000, 23).

Seorang jurnalis, bernama Eko, menjelaskan bahwa terdapat dua kategori figur kepala desa di Kabupaten Kediri. *Pertama*, lurah *tulen* sebagai kepala desa yang memang hanya berprofesi sebagai birokrat. Mereka biasanya ditopang oleh investor politik dalam proses pemilihan kepala desa, dengan jaminan tanah bengkok, proyek pembangunan desa, dan jabatan pamong desa. *Kedua*, ternyata terdapat pula kategori kepala desa lainnya karena tidak semua kepala desa di Kediri adalah lurah *tulen* yang hanya mengandalkan jabatan birokrasi dan penghasilan pribadi dari status sebagai lurah. Di antara mereka ada pula lurah yang memiliki status rangkap sebagai pengusaha. Dalam kapasitas sebagai pengusaha, tentunya mereka sangat berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya (*resources*) yang didapat pengelolaan dana pembangunan desa (Dana Desa), apalagi jika tanah bengkok yang dimiliki desa tersebut sangat luas (Wawancara dengan Eko, 24 Agustus 2017).

Keterlibatan pengusaha dalam kontestasi pilkades di Kabupaten Kediri terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan warga desa, atau dukungan kepada sosok pengusaha tersebut sendiri jika maju langsung sebagai calon kepala desa atau calon lain yang didukungnya. Masyarakat setempat mengakui, tanpa keterlibatan dan dukungan kuat pengusaha – khususnya kelompok oligarki – rasanya sulit bagi calon-calon kepala desa untuk mendapat dukungan warga desa. Bentuk imbalan atas hak atas tanah bengkok dan pengelolaan dana desa, oleh kepala desa terpilih, menjadi faktor pendorong untuk memenangi kepala desa. Sumber

ekonomi berupa tanah bengkok bisa dikelola sendiri atau dijaminan kepada investor politik yang telah membiayai pencalonan sebagai kepala desa. Melalui data luas aset tanah bengkok, terlihat bahwa Desa Tanjung dapat menjadikan lurah atau pamong desa sebagai kelompok elite desa yang memiliki tanah luas.

Tabel 1.
Daftar Aset Tanah Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri

No	Tanah	Luas m ²	Hektare	Nilai Jual	Keterangan
		71850	7,18	2 Milyar	Bengkok Kades
1	Desa Tanjung	248550	24,85	6,7 Milyar	Bengkok Desa
		32650	3,26	1 Milyar	Kas Desa

Sumber: Perangkat Desa Tanjung Tahun 2017

Potensi kepemilikan aset tanah besar Desa Tanjung tersebut, cukup memotivasi para tuan tanah dan pengusaha untuk terlibat dalam dinamika politik di desa tersebut, khususnya para pebisnis tebu. Hal ini ditandai dengan kehadiran calon kepala desa yang berprofesi rangkap sebagai pengusaha, dan jika terpilih mereka dapat memanfaatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan desa. Dengan dukungan kekuatan ekonomi cukup besar tersebut kombinasi calon lurah-pengusaha akan mampu memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa.

Selain tanah aset desa bengkok, motif ekonomi lainnya terkait dengan kompensasi selama menjabat kepala desa berupa penghasilan tetap dan kendali terhadap alokasi dana desa untuk pembangunan Desa Tanjung. Di samping itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi isu ekonomi yang strategis selama menjabat sebagai kepala desa. Namun, penelitian Yuniningsih (2016) menyebutkan bahwa keterlibatan dalam pilkades tidak semata karena faktor ekonomi dan perebutan kekuasaan, melainkan menyangkut pula gengsi, harga diri dan kehormatan.

Dengan demikian, posisi kepala desa sebagai pemegang pucuk struktural kekuasaan di desa selalu berusaha dipertahankan berapapun ongkos politiknya. Kemudian, pembelian suara pemilih desa terjadi bagaikan transaksi bisnis jual-beli suara dalam pasar bebas. Karena

politik desa pascareformasi juga ditandai dengan kebangkitan elite ekonomi yang mempunyai peran lebih signifikan dalam proses pemilihan kepala desa. Ternyata posisi sebagai elite ekonomi dalam stratifikasi sosial masyarakat desa belum cukup memuaskan tanpa jabatan formal sebagai kepala desa. Terkait dengan ini, Aspinall dan Rohman (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa hanya orang kaya saja yang termotivasi maju dalam pemilihan kepala desa karena dampak dari biaya politik untuk maju kepala desa terlalu besar. Hal ini didukung pula oleh adanya aspek kehormatan dan pretise sosial jabatan kepala desa.

POLA OLIGARKI DI PEDESAAN: APA, SIAPA, DAN BAGAIMANA?

Harold D. Laswell terkenal dengan mendeskripsikan politik sebagai siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Ungkapan tersebut masih relevan dengan kondisi dinamika politik di berbagai tingkatan, termasuk di desa saat ini. Hal ini dapat dijelaskan melalui struktur oligarki dan bekerjanya jaringan kekuasaan oligarki di tingkat desa. Berdasarkan penjelasan Robison, munculnya suatu kelas kapitalis di pedesaan akan mempunyai konsekuensi bagi kehidupan politik pedesaan dan antara pedesaan dan negara. Suatu borjuasi agraris yang kuat dengan bersandar pada kekuasaan ekonomi dan sosial yang independen berupa kepemilikan modal akan menyadari bahwa kepentingan mereka tidak terpenuhi melalui jaringan patronase yang ada, sebab kepentingan mereka sebagai suatu kelas hanya bisa dijamin oleh kebijaksanaan negara (Robison 1981, 23). Lebih lanjut kelas kulak tersebut terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah sendiri, dari kepala desa, sersan tentara sampai bupati dan pejabat tinggi, tampil menjadi tokoh-tokoh terkemuka dalam pengembangan kelas kulak (Robison 1981, 12).

Aktor-aktor yang muncul dalam politik desa di Kabupaten Kediri pasca-Orde Baru umumnya adalah bagian dari jaringan kekuasaan kelas kulak tersebut. Penjelasan Robison senada dengan yang dijelaskan oleh Hadiz. Aktor politik di tingkat lokal pasca-Orde Baru umumnya diisi oleh mantan birokrat tua atau tentara, pengusaha kelas kecil atau menengah yang banyak mengandalkan proyek dan kontrak negara,

politisi dari partai-partai yang terkait dengan Orde Baru, dan mantan aktivis organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang dekat dengan Orde Baru (Hadiz 2003, 244; 2010, 92-93; Ananta 2016, 116). Meskipun terdapat perbedaan struktur elite politik yang berkontestasi di tingkat desa dengan tingkat lokal (kabupaten/kota dan provinsi), tetapi pergeseran elite lokal pasca-Orde Baru baik di tingkat desa dan supradesa biasanya identik dengan kebangkitan elite ekonomi baru dan bertahannya elite lama yang merupakan keturunan kepala desa terdahulu atau disebut dengan *luri*.

Pemberlakuan Undang-Undang No. Tahun 2014, yang mengatur jabatan kepala desa sampai tiga periode, memiliki dampak yang nyata bagi dinamika politik desa. Salah satu yang terlihat nyata adalah keterlibatan calon kepala desa yang berasal dari pengusaha dan birokrat mantan kepala desa dan dapat dikatakan mereka mendominasi calon-calon kepala desa pada pilkades serentak tahun 2016 yang lalu. Dari 61 desa yang menyelenggarakan pilkades serentak di Kabupaten Kediri, hanya delapan desa yang tidak memiliki calon dari mantan kepala desa atau petahana. Selain kedelapan desa itu, paling tidak ada calon-calon kepala desa di 53 desa di kabupaten tersebut yang merupakan *incumbent* dan mantan kepala desa yang mencalonkan diri lagi (Radarkediri.jawapos.com, 22 Juli 2017). Berdasarkan fenomena tersebut dan mengutip penjelasan Aspinall dan Rohman, posisi politis seorang kepala desa pasca-Orde Baru ditandai dengan relasi kekuasaan dengan pejabat tinggi negara yang lebih cair dan lebih berimbang. Dengan kondisis semacam itu, dapat dikatakan bahwa kepala desa sekarang lebih mirip dengan (*rural broker*) atau perantara pedesaan sejati (Aspinall dan Rohman 2017).

Dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi desa justru membuat jejaring oligarki lokal meningkat peranannya. Hal ini terlihat dari perebutan kekuasaan jabatan kepala desa yang didominasi dari warga desa yang memiliki kekayaan. Golongan elite ekonomi desa yang biasanya mengambil posisi di luar lingkaran kekuasaan berusaha mempertegas status elite desa menjadi oligark yang mampu menguasai birokrasi desa. Oleh sebab itu, struktur relasi politik desa

dan jejaring kekuasaan hasil interaksi jabatan politis di desa dengan pengusaha cenderung menyuburkan praktik oligarki di tingkat desa.

Mengacu kepada Hadiz terkait pola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal pasca-Orde Baru, penjelasan terhadap ciri-ciri mendasar oligarki tingkat lokal dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Kajian dengan tesis oligarki, seperti kajian Robison dan Hadiz (2004; 2013) serta Winters (2011; 2013) yang berargumen bahwa para aktor yang kaya telah mendominasi demokrasi di Indonesia juga menekankan adanya politik uang sebagai perekat politik dan memenangkan sumber daya publik (Hadiz 2010, 119-133). Secara politik uang di tingkat desa dilakukan sebagai suatu bentuk pemberian berupa uang ganti rugi meluangkan waktu datang ke tempat pemungutan suara. Masyarakat Kediri biasanya menyebut istilah ini dalam bahasa Jawa dengan *iciran*. Praktik *iciran* tidak hanya dalam kehidupan sosial orang Jawa sehari-hari, tetapi sudah mulai merasuki kehidupan politik khususnya masyarakat pedesaan Jawa. Liberalisasi politik setelah reformasi, berdampak kepada sebagian besar pemilih masyarakat desa bergeser ke arah pemilih yang pragmatis. Pandangan ini sering didasarkan pada adagium yang berkembang di masyarakat desa '*ora iciran ora nyoblos*' (tidak ada uang tidak akan memilih dalam pilkades).

Beberapa model operasional pembagian *iciran* yang ditemukan di lapangan saat pilkades Tanjung terbagi menjadi 3 (tiga) variasi utama. *Pertama*, calon kepala desa langsung dari pintu ke pintu menemui warga desa untuk silaturahmi. Model ini bersifat personal dan sangat populer berupa kunjungan *door to door* atau *canvassing* (dikenal pula dengan istilah DTD di kalangan penduduk lokal). Pada umumnya, setiap calon kepala desa mengunjungi semua warga desa dengan cara sosialisasi akan maju di pilkades, untuk itu meminta doa restu dan dukungan. *Kedua*, calon kepala desa menugaskan kader untuk membagikan amplop *iciran* kepada warga desa. Beberapa calon kepala desa menempatkan kader di tingkat RW, sementara yang lain memiliki kader sampai ke tingkat RT. *Ketiga*, ada para calon kepala desa hanya mendatangi sesepuh, tokoh masyarakat orang kunci (*key person*), atau

orang paling berpengaruh di komunitas desa. Sebagai elite desa, mereka mempunyai kemampuan untuk membentuk opini publik di desa tentang siapa sosok calon kepala desa yang terbaik.

Pada pilkades di Desa Tanjung, ketiga calon kepala desa menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pemilih desa. Mereka mengaku uang tersebut untuk *shodaqoh*.³ Sementara untuk urusan jago masing-masing pemilih, semua dikembalikan ke keyakinan masing-masing dan tidak bersifat memaksa untuk kepentingan pilkades. Besar kecilnya politik uang yang disebar besar kecilnya tergantung kekuatan ekonomi calon kepala desa (Wawancara dengan Rudi, 16 Agustus 2017). Kontestan lainnya, Vito yang berprofesi sebagai penjual nasi bebek, mengaku tidak punya modal sama sekali untuk memberikan politik uang. Namun, karena semua calon kepala desa harus bermodalkan uang, ia diberi modal dalam bentuk pinjaman hutang dari keluarga besarnya yang juga mantan kepala desa Tanjung. Karena itu, ia hanya mampu memberikan *iciran* paling sedikit dibandingkan calon kepala desa lainnya (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).

Sementara itu, salah satu oligark terkuat di Tanjung yang juga petahana mengaku mampu membagikan politik uang paling besar di antara ketiga kandidat agar terpilih sekali lagi. Menurut pengakuannya, kemampuannya ini didukung oleh profesinya sebagai pedagang mobil bekas, selain beberapa bisnis lainnya (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2017). Fenomena politik uang di dalam pilkades tersebut, berkaca pada teori oligarki Hadiz, merupakan salah satu ciri-ciri kekuasaan oligarki, yaitu penggunaan politik uang untuk membeli suara dalam pemilihan umum (Hadiz 2010, 122-123). Menurutnya, pembelian suara (*vote buying*) dimaknai sebagai “distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.” Di daerah pedesaan, praktik-praktik pembelian suara sema-

³ *Shodaqoh* atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak karena sedekah tidak hanya menyumbang atau mengeluarkan harta, namun juga mencakup semua amal perbuatan baik (wikipedia, 12 Desember 2018).

cam ini populer dengan istilah serangan fajar (Aspinall dan Sukmajati 2015, 24).

Kedua, predatoris menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial secara individu. Maksudnya adalah jejaring kekuasaan melibatkan kepentingan bisnis dan politiko-birokrat yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial individu. Periode pasca-Orde Baru ditandai dengan cara kerja oligarki yang sedikit berbeda dengan masa sebelumnya, tetapi tetap dengan karakter yang sama, yaitu bersifat predator (Hadiz 2010, 95; lihat juga Ananta 2016, 123). Dalam konteks politik Desa Tanjung, jejaring kekuasaan oligarki diwakili oleh calon *incumbent* yang terlihat ingin kembali menggunakan institusi negara, khususnya birokrasi desa, untuk mempertahankan sumber material berupa tanah aset Desa. Sebagai calon kepala desa yang berprofesi ganda, yakni kepala desa dan pengusaha maka nilai ekonomis tanah aset desa tentu sangat bisa dijadikan akumulator modal dengan cara dikelola sendiri atau disewakan kepada pengusaha, seperti pebisnis tebu.

Tanah bengkok ini biasanya cukup menjadikan kepala desa dan perangkat-perangkat desa sebagai pemilik tanah luas, walaupun hanya selama menjabat. Dalam perubahan sosio-ekonomi sejak periode penjajahan, kekuasaan pemilik tanah semakin bertambah, dan di antara pemilik-pemilik tanah, kekuasaan kepala desa, yang mempunyai peran utama dalam demokrasi desa dengan demikian juga semakin bertambah (Tjiptoherijanto dan Prijono 1983, 63-64). Apalagi, Agus sebagai *incumbent* pernah menjelaskan juga bermain di sektor bisnis tebu dan bahkan pernah ditunjuk menjadi koordinator penyediaan bibit tebu di Kabupaten Kediri (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2018). Dari fakta tersebut, terlihat bahwa institusi birokrasi desa dapat dijadikan objek kekuasaan para aktor-aktor oligarki di desa dengan motif untuk mempertahankan kekayaan (*wealth defense*). Misalnya, kepemilikan tanah aset desa dan fasilitas-fasilitas materi lainnya yang didapatkan selama menjabat sebagai kepala desa.

Konsep oligarki Robison maupun Hadiz, dan Winters sangat membantu dalam menjelaskan dinamika kompetisi para aktor-aktor politik

di ranah politik desa, seperti calon kepala desa yang bertarung dalam pilkades di Desa Tanjung dan mungkin kemudian tampil sebagai pemenang. Oligark pemenang kontestasi yang kemudian memimpin desa (organisasi pemerintahan desa), ketika mengeluarkan kebijakan, tentu akan dipengaruhi oleh investor politik, tim sukses dan kader yang sebelumnya membuat perjanjian dengan dirinya. Namun, dengan asumsi dengan biaya politik cukup tinggi saat pilkades, apakah dengan jabatan kepala desa yang diperoleh oligark bisa mengembalikan modal untuk aktivitas politik uang. Fenomena ini cukup menarik untuk dielaborasi lebih detail dalam memotret praktik oligarki di tingkat desa.

Ketiga, terdapat jaringan patronase di antara pejabat pemerintahan, pengusaha lokal, organisasi preman, dan aparat keamanan. Integrasi oligark desa kepada struktur kekuasaan negara dan nonnegara masih dapat ditemukan dalam dinamika politik di Desa Tanjung. Karena pada kontestasi inilah berbagai elemen kekuatan sosial, ekonomi, dan politik terlihat lebih tegas berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa Tanjung. Meskipun demikian, tidak semua calon kepala desa berasal dari keluarga kaya dan mempunyai akses kepada akses sumber daya kekuasaan kepada struktur birokrasi supradesa dan aparat keamanan negara. Dalam kasus Desa Tanjung, salah satu calon kepala desa yang mengaku punya akses dalam struktur kekuasaan oligarki di tingkat kabupaten adalah calon kepala desa *incumbent*. Bahkan berdasarkan hasil wawancara, yang bersangkutan mengaku punya hubungan cukup dekat dengan Bupati Kediri Haryanti (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2018).

Pasca-Orde Baru, relasi kekuasaan kepala desa dengan negara berubah drastis, dari yang cenderung administratif menjadi cenderung transaksional. Aspinall dan Rohman menunjukkan bahwa integrasi elite desa ke dalam struktur kekuasaan eksternal (pemerintah daerah dan pusat) terus berlanjut, seperti saat Orba yang bersifat otoriter-birokratik. Mereka juga mengumpulkan sumber kekayaan dan otoritas yang berasal dari hubungan yang berada di luar struktur kekuasaan desa. Hubungan kepala desa dengan pejabat tinggi negara (camat dan bupati) merupakan akses terhadap patronase politik. Hubungan itu tetap

dianggap penting meskipun model relasi kekuasaan telah berubah. Di bawah Orde Baru, elite desa diintegrasikan dari atas ke bawah. Meskipun mereka dapat memperoleh keuntungan material dari interaksi dengan penguasa yang lebih tinggi, mereka memiliki sedikit kekuatan tawar menawar dalam hubungan ini. Agar tetap bertahan dalam jabatannya, kepala desa dan pejabat desa lainnya harus menunjukkan kesetiaan kepada negara dan utilitas kepada kekuasaan Orde Baru. Kini, hubungan dengan pejabat tinggi itu lebih cair dan berimbang (Aspinall dan Rohman 2017; lihat juga Antlov 1995, 58).

Selain sumber daya material, pihak *incumbent* juga menggunakan akses sumber daya dari institusi birokrasi supradesa. Misalnya, pada saat menjelang pilkades, *incumbent* dapat langsung mengajukan pembangunan desa dalam bentuk pengaspalan jalan, saluran air, dan fasilitas lainnya, langsung melalui Bupati Kediri. Sebagai imbalannya Desa Tanjung menjadi tuan rumah kegiatan sang Bupati seperti sholat malam seluruh Kabupaten Kediri, sementara seluruh akomodasi kegiatan (tenda, konsumsi, dan sebagainya) ditanggung oleh kepala desa tersebut. Bentuk transaksional politik lainnya di antaranya dukungan politik saat pemilihan bupati mendatang (pemilihan bupati Kediri) dan dukungan politik terhadap partai yang berafiliasi dengan bupati tersebut dalam pemilihan legislatif, yakni PDI Perjuangan (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2018). Selanjutnya, calon *incumbent* juga menjelaskan bahwa ia memiliki akses terhadap aparat keamanan negara, yaitu kepolisian. Menurutnya, akses terhadap kepolisian memiliki banyak keuntungan, seperti ketika ada permasalahan dapat dicarikan solusinya secara langsung (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2018).

Namun, fenomena yang paling susah dibuktikan sebagai ciri mendasar oligarki di desa adalah penggunaan aparat kekerasan nonnegara. Berdasarkan pengamatan, jaringan kelompok-kelompok kekerasan tersebut di tingkat desa cenderung tidak terorganisasi, berbeda dengan operasional oligarki di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hanya saja, beberapa bentuk intimidasi pernah dialami oleh calon kepala desa Vito yang mengaku pernah didatangi sekelompok pemuda desa supaya yang mendesaknya untuk mundur dari pemilihan kepala desa. Kelompok pe-

muda tersebut berasal dari lawan politik. Mereka menghinanya dengan mengatakan bahwa ia hanya bermodal kotoran sapi, tapi berani maju dalam pemilihan kepala desa. Dalam Bahasa Jawa, ungkapan bernada ancaman itu kurang lebih '*macung kok modal teletong*' (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017). Fenomena menyerang figur personal kandidat dalam kontestasi politik oleh kelompok pemuda desa tersebut dianggap justru memanaskan tensi politik pilkades di Desa Tanjung. Namun, ketegangan politik tersebut tidak sampai menimbulkan bentrokan fisik antarpendingung calon kepala desa.

GAGALNYA POLITIK OLIGARKI DALAM PILKADES TANJUNG

Winters, Hadiz dan Robison secara langsung mendiskusikan oligarki dalam politik nasional dan politik lokal. Dengan mengamati proses desentralisasi, mereka mengatakan bahwa transfer kekuasaan ke tingkat lokal telah menciptakan arena baru persetujuan politik. Dengan kata lain, elite politik-birokrasi lokal warisan Orde Baru bisa memanfaatkan arena tersebut untuk mengumpulkan sumber daya material sebanyak mungkin (Ford dan Pepinsky 2013). Dengan kata lain, kajian politik lokal dengan tesis oligarki berargumen bahwa penguasaan sumber daya material dan lembaga politik akan selalu menjamin dominasi kekuasaan oligarkis dalam politik lokal (Pilkada) dan politik nasional (Pilpres dan Pileg). Posisi artikel ini berfokus untuk menguji tesis para teoritis oligarki di tingkatan yang lebih rendah, yakni apakah keunggulan sumber daya material dan penguasaan lembaga politik juga menjamin kelanggengan kekuasaan oligarki dalam dinamika politik di tingkat desa. Desa Tanjung menjadi kasus yang digunakan untuk menguji argumen kekuasaan oligarki tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapatkan, terdapat fenomena menarik terkait praktik oligarki di Desa Tanjung. Di desa tersebut, penguasaan sumber daya material dan lembaga politik desa oleh pihak *incumbent* tidak memberikan jaminan untuk mendominasi pemilihan kepala desa. Calon kepala desa petahana yang dapat dikatakan mewakili ciri-ciri oligark ternyata kalah dalam pilkades yang

lalu sehingga dapat dikatakan hasil Pilkades Tanjung bertolak belakang dengan fenomena praktik oligarki yang mendominasi penguasaan politik lokal kabupaten/kota dan provinsi, juga politik nasional, seperti yang diajukan oleh pendukung argumen oligarki. Penggunaan uang untuk menarik perhatian pemilih dapat terlihat dari penjelasan *incumbent* yang mengaku walaupun sudah menyebar uang terbesar (Rp 200 ribu per pemilih), tetapi langkah itu tidak efektif untuk meraup suara terbesar. Petahana mengaku hasil pilkades sulit untuk diterima karena pembagian politik uang tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan dua calon kepala desa lainnya. Kekalahan itu sungguh mengherankan bagi petahana karena pemenang pilkades hanya menyebar uang sebesar Rp 30 ribu per pemilih dan kandidat lainnya sebesar Rp 100 ribu per pemilih (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2017). Pada sisi lain, *incumbent* juga sudah membuka akses kekuasaan dengan Bupati Kediri untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung agar terpilih lagi menjadi kepala desa. Apalagi, hasil rekapitulasi suara pilkades Desa Tanjung menunjukkan selisih suara kekalahan *incumbent* yang cukup telak.

Tabel 2. Rekapitulasi Suara Pilkades Tanjung Tahun 2016

JML DPT	No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Surat Suara		Kehadiran
			Sah	Tidak Sah	
3075	1	DON VITO GUSBAKI	1,477		2849
	2	RUDI WIDIYANTO	505	24	93%
	3	AGUS DWI WIDODO	843		

Sumber: DPMPD Kab Kediri Tahun 2016

Kontestasi politik di Desa Tanjung tersebut sedikit banyak membuktikan bahwa dalam pemilihan kepala desa faktor penentu kemenangan bukan hanya dari sumber daya material dan penguasaan lembaga negara yang merupakan ciri dasar oligarki di tingkat lokal. Sebaliknya, artikel ini menekankan adanya faktor lain yang membentuk politik desa di Indonesia, termasuk di antaranya sumber kekuasaan nonmaterial, yang dalam tulisan ini dielaborasi sebagai sumber kekuasaan dalam konsepsi Jawa. Adanya faktor itu membuat sumber daya kekuasaan dalam pilkades di Desa Tanjung berbeda dengan temuan studi-studi sebelumnya

yang menekankan keunggulan sumber daya material yang membentuk politik Indonesia dalam pemilihan umum dan kepala daerah (pilpres, pileg, dan pilkada). Karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya material tidak memberikan jaminan bagi oligark untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Berkaca kepada konsep kekuasaan Jawa menurut Anderson (1976) dan Moertono (1987), biasanya seorang raja akan memiliki kekuasaan yang besar antara lain apabila dia memperoleh tanda kekuasaan berupa wahyu dari penguasa alam semesta. Untuk mempertahankan kekuasaan agar terus memusat, seorang raja atau penguasa biasanya melakukan pengekangan diri, antara lain dengan menjauhkan diri dari berbagai hal keduniawian, seperti bertapa, berpuasa, atau melakukan tapabrata; mengumpulkan potensi magis pusaka-pusaka dan manusia yang dianggap sakti; menarik dukun-dukun termasyhur; dan ziarah ke makam-makam raja-raja terdahulu (Suseno 1996, 104). Uniknya, walaupun calon kepala desa mengandalkan kekuataan material, semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi Pilkades juga menggunakan sumber kekuasaan nonmaterial yang identik dengan praktik kekuasaan Jawa, yaitu berupa penerahan ilmu gaib atau ilmu hikmah yang mereka miliki, atau setidaknya upaya menyimpan pusaka, jimat, dukun, serta ziarah makam pendiri desa (*pesarean*). Dari pengakuan para calon kepala desa di Desa Tanjung, penggunaan sumber-sumber kekuasaan Jawa tersebut berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pemilihan kepala desa.

Dari pengamatan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian di Desa Tanjung, paling tidak terdapat tujuh aktivitas calon kepala desa yang didasarkan atas konsepsi kekuasaan Jawa. Ketujuh aktivitas tersebut adalah upacara *Slametan* di makam pendiri desa; jasa *pitou* berasal dari kiai dan dukun; kepemilikan benda-benda pusaka; pulung sebagai tanda kekuasaan; *petungan* atau penggunaan sistem penanggalan Jawa; laku *ngelmu* dan tirakat; dan *luri* atau garis keturunan kepala desa, sedangkan sumber kekuasaan material yang diterapkan dalam pilkades di Desa Tanjung terbagi menjadi lima kategori, yaitu *iciran* dalam bentuk politik uang; *sangu* berupa pemberian barang; *ngebosi* atau makan dan

minum gratis; *club goods* atau pemberian barang kepada komunitas desa; dan pemanfaatan jaringan birokrasi.

Penggunaan dari semua sumber kekuasaan, baik material maupun spiritual, digambarkan dalam penjelasan berikut ini. Penjelasan dimulai dari salah satu calon kepala desa yang bernama Don Vito Gusbaki atau lebih sering dipanggil dengan Vito. Ia merupakan calon kepala desa yang berprofesi sebagai pedagang nasi bebek dan berhasil memenangkan pemilihan kepala desa yang lalu. Karena keterbatasan sumber daya material, ia hanya bisa membagikan uang dalam bentuk *iciran*, yakni 30 ribu rupiah per pemilih dan mengeluarkan dana sedikit untuk kegiatan *ngebosi*, yakni berupa menyediakan makanan dan minuman saat malam menjelang pemilihan kepala desa. Vito menjelaskan bahwa calon yang lain cenderung membeli suara dengan cara '*nuku*' dan mengharuskan mereka menyiapkan dana yang cukup besar. Karena Vito tidak memiliki dana sebesar dua calon lainnya ia lebih menggunakan strategi '*laku*' yang identik dengan sumber kekuasaan spiritual Jawa. Beberapa aktivitas yang ia lakukan di antaranya adalah (1) menyelenggarakan upacara *slametan* di makam ketiga pendiri desa (Mbah Prabu Anom Pangeran Pakpak, Mbah Wonokarso dan Mbah Ageng Gindho); (2) menyimpan benda-benda pusaka peninggalan orang tua berupa kentongan, tombak kecil, keris, besi kuning, dan payung kecil; (3) menginap di rumah warga yang dekat dengan lokasi jatuhnya pulung karena yakin akan pulung sebagai tanda kekuasaan; (4) melakukan *laku ngelmu*, yakni tirakat berpuasa dan dizikir di rumah, bertapa di makam pendiri desa dan ritual khusus memakai baju Raja Jawa di petilasan Joyoboyo; (5) mengambil jasa *pitou* yang berasal dari dukun Jawa yang telah membantu kemenangan pilkades di Desa Sitimerto yang sudah turun-temurun dikenal keluarga; dan (6) menyebarkan kabar bahwa ia merupakan salah satu keturunan lurah atau *trah* kepala desa yang mungkin bisa mempengaruhi pemilih desa melalui jaringan patron-klien.

Calon-calon kepala desa yang kedua adalah Rudi Widiyanto. Ia berprofesi sebagai perangkat desa Kaur (Kepala Urusan) Keuangan (atau dikenal dengan Pak Bayan). Sebagai perangkat desa yang memi-

liki akses terhadap sumber daya material di desa, ia mampu membagikan uang dalam bentuk *iciran* sebesar 100 ribu, membagikan barang sembako, dan melakukan *ngebosi* atau acara makan-makan di rumah menjelang pemilihan. Sama halnya dengan Vito, ia juga mencoba memaksimalkan sumber daya kekuasaan spiritual. Beberapa aktivitas yang dilakukannya misalnya mengadakan acara *slametan* di makam pendiri desa, menggunakan jasa *pituo* dari kalangan dukun Jawa, dan memercai adanya pulung dengan menginap di rumah warga diyakini dekat dengan lokasi jatuhnya pulung. Ia juga dikenal sebagai calon kepala desa yang mempunyai keahlian sistem hitungan Jawa yang bernama kitab primbon Betaljemur Adammakna.

Calon kepala desa berikutnya adalah seorang *incumbent* yang bernama Agus Dwi Widodo. Agus merupakan kepala desa periode sebelumnya yang juga berprofesi sebagai pengusaha. Sebagai *incumbent* dan pengusaha Agus memiliki kemampuan untuk menyediakan imbalan materi lebih dari dua calon lainnya. Ia mampu membagikan politik uang paling besar, yakni 200 ribu per pemilih dan pemberian barang sembako berupa beras. Sumber daya material lainnya adalah dalam bentuk *club goods* untuk infrastruktur jalan desa walaupun sebenarnya merupakan sumbangan pembangunan proyek pemerintah Kabupaten Kediri. Pada saat malam menjelang pemilihan disediakan berbagai macam makanan dan minuman di rumah kandidat tersebut yang identik sebagai praktik *ngebosi*. Selain itu, Agus juga menguasai lembaga birokrasi desa serta memiliki kedekatan dengan jaringan kekuasaan pemerintahan Kabupaten Kediri dan aparat keamanan. Dengan semua sumber daya material tersebut, ia tampak yakin dapat memenangkan pemilihan kepala desa dengan mengandalkan sumber tersebut.

Keyakinannya tersebut didasari pula dengan kenyataan bahwa ia tidak terlalu *kejawen* (kepercayaan terhadap nilai-nilai Jawa) sehingga kurang percaya sumber kekuasaan Jawa. Namun, atas saran dari para kadernya ia juga melakukan beberapa aktivitas yang terkait dengan sumber daya spiritual. Aktivitas itu di antaranya adalah mengadakan acara *slametan* di makam pendiri desa; menggunakan jasa seorang *pituo* dari golongan kiai yang sudah dianggap cocok dengan keluarga;

mengembangkan cerita bahwa ia termasuk keturunan lurah atau *trah* kepala desa dari garis keturunan kakek; dan terakhir memiliki benda pusaka berupa batu, kain putih, dan besi kuning yang dipinjamnya saat pemilihan kepala desa tahun 2016 tersebut.

Agar lebih jelas, konfigurasi penggunaan sumber daya kekuasaan dalam pemilihan kepala desa di Desa Tanjung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sumber-Sumber Kekuasaan Kontestan Pilkades Tanjung Tahun 2016

No. Urut	Nama Calon	Konfigurasi Sumber Kekuasaan	
		Material	Spiritual
1	Vito	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Iciran</i> Rp. 30.000 2. <i>Ngebosi</i> makan-minum di rumah kandidat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Slametan</i> di pundhen desa 2. <i>Pitou</i> (jasa dukun) 3. Benda pusaka wesi aji, keris, kentongan, tombak, dan lainnya 4. Pulung 5. <i>Petungan</i> 6. Laku Ngelmu dan Tirakat di Pundhen desa dan petilasan Joyoboyo 7. <i>Luri</i> (garis keturunan lurah dari Orang Tua yang bernama Mubarak)
2	Rudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Iciran</i> Rp. 100.000 2. <i>Sangu</i> Barang sembako 3. <i>Ngebosi</i> makan-minum di rumah kandidat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Slametan</i> di pundhen desa 2. <i>Pitou</i> (jasa dukun) 3. Pulung 4. <i>Petungan</i> (paham primbon Bataljemur Adammakna)
3	Agus	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Iciran</i> Rp. 200.000 2. <i>Ngebosi</i> di warung sekitar desa dan rumah kandidat 3. <i>Sangu</i> barang sembako 4. <i>Club Goods</i> infrastruktur desa 5. Jaringan birokrasi dan aparat keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Slametan</i> di pundhen desa 2. <i>Pitou</i> (jasa kiai) 3. Benda pusaka batu, kain, besi kuning 4. <i>Luri</i> (garis keturunan lurah dari kakek)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai sumber-sumber kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa oleh setiap calon kepala desa. Terlihat bahwa calon yang kurang memiliki sumber daya material, utamanya Vito, kemudian lebih mengintensifkan upaya kampanye dengan melakukan aktivitas-aktivitas spiritual terkait dengan kepercayaan Jawa. Tabel di atas juga menunjukkan secara jumlah aktivitas tersebut terhitung lebih banyak dari aktivitas yang mengandalkan material (*iciran* dan *ngebosi*). Jumlah tersebut juga lebih

banyak dari calon kepala desa lainnya. Seperti yang diungkapkan kepala desa terpilih Vito, ia mengaku lebih condong menggunakan sumber kekuasaan nonmaterial yang identik dengan praktik *laku* kekuasaan Jawa daripada membeli suara atau *nuku*. Salah satu yang mendorongnya lebih condong ke cara ini adalah loyalitas yang ditunjukkan oleh para kadernya memang lebih terbangun karena hubungan spiritual. Ia menjelaskan bahwa setelah menjalankan praktik *laku* ada semacam petunjuk, seperti cahaya yang disaksikannya langsung bersama kader-kader pada malam hari menjelang pemilihan. Setelah itu semua kader semakin termotivasi bergerak untuk memenangkan Vito pada pilkades di Desa Tanjung. Apalagi, para kader tersebut adalah pendukung sejak zaman bapaknya dulu yang merupakan mantan kepala desa Tanjung. Terlihat bahwa hubungan patron-klien antara keluarga Vito dengan para pendukung masih cukup kuat dan kesadaran tersebut masih ada. Dampaknya adalah para kader justru gotong royong menyediakan logistik untuk kepentingan pilkades dan tidak meminta uang kepada Vito dan keluarganya (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).

Terlepas apakah Vito lebih percaya kepada faktor spiritual ataukah hanya sekedar pilihan yang paling mungkin karena ketiadaan sumber daya material yang cukup, pilihan untuk menggunakan atau tidak sumber kekuasaan berdasarkan kepercayaan Jawa juga didasari oleh ketidakpercayaan terhadap bekerjanya sumber tersebut. Paling tidak, kondisi tersebut diungkapkan oleh Agus yang memang mengaku tidak memiliki kaitan kuat dengan nilai-nilai Jawa. Kepercayaan diri terhadap bekerjanya sumber material itu dibandingkan spritiual itu terlihat dari lebih sedikitnya aktivitas terkait dengan nilai-nilai Jawa yang dilakukan oleh Agus.

Sementara itu, Rudi terlihat tidak memaksimalkan salah satu sumber karena kedua jenis aktivitas (material dan spiritual) terlihat berimbang. Namun, ia terlihat cukup yakin bahwa sumber kekuasaan berdasarkan nilai-nilai Jawa akan bekerja karena ia juga ahli dalam membaca tulisan-tulisan terkait dengan kepercayaan Jawa itu. Walaupun demikian, ia nampak tidak hanya percaya kepada satu sumber sehingga juga berusaha memaksimalkan sumber material, sedangkan kedua lawannya

yang lebih memilih menggunakan sumber daya material untuk membeli suara pemilih desa, juga menggunakan jasa kader dalam mendistribusikan sumber daya material dalam bentuk uang yang dibagikan dalam pilkades di Desa Tanjung. Akan tetapi, berbeda dengan hubungan antara Vito dan kadernya, menurut kedua calon lainnya tidak semua kader itu ada yang baik karena ada juga kader yang juga mengadep ke semua calon kepala desa yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dari para calon kepala desa. Menurut calon kepala desa Agus dan Rudi, ada juga kader yang menipu dalam pilkades yang lalu karena motivasi para kader dalam memberikan dukungan tidak berdasarkan loyalitas, melainkan besaran transaksi uang yang diperoleh para kader tersebut (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2017 dan Rudi, 16 Agustus 2017).

KESIMPULAN

Dari studi ini dapat disimpulkan sumber-sumber kekuasaan digunakan para kontestan dalam pilkades di Desa Tanjung terdiri dari sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan Jawa bersifat spiritual. Dalam pilkades tersebut faktor kemenangan bukan hanya berdasarkan penguasaan lembaga negara dan sumber daya material yang merupakan karakter dasar politik oligarki, seperti yang diajukan oleh beberapa pendukung argumen ini. Kasus kekalahan telak *incumbent* dalam pilkades di Desa Tanjung membuktikan bahwa penggunaan uang dan penguasaan lembaga negara tidak berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh, padahal kondisi tersebut dipastikan oleh Winters dan Hadiz maupun Robison, akan mampu memenangkan bentuk pemilu lainnya di tingkat lokal dan nasional.

Pilkades di Desa Tanjung menunjukkan bahwa semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial digunakan oleh calon kepala desa peluang terpilih semakin seorang calon juga semakin besar. Sebaliknya, banyaknya sumber daya ekonomi dan politik tidak menjamin bertahannya kekuasaan di tingkat desa. Dilihat dari perspektif elite, hal ini membuktikan bahwa masih ada hubungan patron-klien yang dapat memengaruhi pemilih di pedesaan. Dalam hal ini, kepala desa terpilih merupakan termasuk golongan elite desa yang berasal dari golongan

trah kepala desa. Dapat dikatakan bahwa kepala desa terpilih berhasil menjaga kesadaran hubungan patron-klien warga dari jasa orang tua terdahulu saat menjabat kepala desa.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kasus di tingkat desa memperlihatkan adanya faktor lokalitas yang lebih kuat. Karakter masyarakat di Desa Tanjung yang masih memiliki ikatan dengan nilai-nilai Jawa menjadi salah satu sebab bekerjanya sumber-sumber kekuasaan berdasarkan konsepsi Jawa. Dengan demikian, tidak selalu semua tindakan calon yang memberikan imbalan material dapat dilihat sebagai faktor yang kurang diterima sebagai absahnya kekuasaan seseorang. Desa Tanjung memang tidak menjadi kasus yang dapat membantah argumen politik oligarki karena perbedaan tingkatan analisis. Walaupun analisis oligarki dapat bekerja di tingkat lokal (kabupaten atau kota), namun karakter masyarakat di wilayah tersebut belum tentu sama di desa yang berbeda. Untuk kasus tertentu dengan karakter masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa penggunaan sumber daya material akan kurang maksimal bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Dicky Dwi. 2016. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014." *Jurnal Politik* 2 (1): 101-135.
- Anderson, Benedict R.O'G. 2000. *Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Aspinall, Edward dan Noor Rohman. 2017. "Village Head Election in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite." *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1): 31-52.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Bahar, Moh. Syaeful. 2017. "Interaksi Antara Kiai dan Bejingan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bondowoso: Studi Tentang Pola Hubungan Orang Kuat Lokal Pasca Orde Baru." Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. (Terjemahan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ford, Michele dan Thomas B Pepinsky. 2014. "Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *Prisma* 33 (1): 3-10.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-authoritarian Indonesia A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford University Press.
- Iberamsjah. 2002. "Elit Desa Dalam Perubahan Politik: Kajian Kasus Pengambilan Keputusan di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pada Masa Awal Penerapan Otonomi Daerah 2000-2001." Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Moerton, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Magnis Suzeno, Franz. 2003. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1991. *Pesta Demokrasi di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Robison, Richard. 1981. "Culture, Politics and Economy in the Political History of The New Order." *Indonesia* 31 (4): 1-29.
- Soeseno, Nuri. 2015. "Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama." *Jurnal Politik* 1 (1): 5-38.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Sukron, Ahmad. 2017. "Pergeseran Elit Politik Lokal: Pilkades Klebung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan." Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Suyanto, Isbodroini. "Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta dan Yogyakarta." Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.
- Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. 2016. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, (2): 231-261.
- Wawancara dengan Agus, Calon Kepala Desa Tanjung pada tanggal 18 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Eko, Wartawan Koran Lokal Kediri pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Rudi, Calon Kepala Desa Tanjung pada tanggal 16 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Satirin, Kepala BPMPD Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Agustus 2018.
- Wawancara dengan Vito, Calon Kepala Desa Tanjung, pada tanggal 15 Agustus 2017.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winters, Jeffrey A. 2014. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia." *Prisma* 33 (1): 11-34.